

## **BAB II**

### **PARTAI GOLONGAN KARYA DI KOTA YOGYAKARTA**

#### **A. Sejarah Perkembangan Partai Golongan Karya**

##### **1. Sejarah berdirinya Partai Golkar**

Semangat kekaryaannya yang terwujud dalam bentuk pengakuan terhadap golongan karya bibitnya telah tumbuh ketika pembahasan penyusunan UUD 1945 sedang dilakukan. Namun kedudukannya secara formal belum diatur dengan tegas pada awal kemerdekaan, hingga keluarnya Maklumat Wakil Presiden.

Pada tanggal 16 Oktober 1945 keluar Maklumat Wakil President Nomor X, yang disusul kemudian dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, yang memberi kesempatan mendirikan partai-partai politik dengan ideologi yang beraneka ragam.

Kehidupan politik dalam sistem multi Partai tersebut berlangsung sampai tahun 1957 dalam zaman yang dikenal dengan sebutan zaman demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Dalam zaman ini kendali percaturan politik berada ditangan partai-partai politik. Kendati pemilu 1955 telah dilangsungkan namun tidak ada satu pun partai politik yang cukup dominan mengendalikan parlemen maupun pemerintahan. Keadaan demikian, mendorong setiap kabinet berbentuk kabinet koalisi secara silih berganti.

Dalam suasana demikian antara tahun 1950-1957 tidak kurang enam kabinet silih berganti. Setiap kabinet baru melahirkan program baru. Program kabinet lama ada yang diteruskan tetapi lebih banyak yang dibatalkan karena

tidak sesuai dengan program partai politik yang berkuasa. Akibatnya banyak program yang sedang dalam pelaksanaan menjadi terlantar dan menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit. Pemerintah selalu ragu-ragu untuk melaksanakan programnya, karena selalu dihantui oleh seringnya pergantian kabinet dalam waktu relatif singkat. Sejarah telah mencatat bahwa umur kabinet pada zaman demokrasi parlementer tersebut rata-rata kurang dari satu tahun. Oleh sebab itu dapatlah dimengerti, bahwa tidak satupun kabinet dapat melaksanakan pembangunan, karena setiap kabinet tidak mempunyai waktu yang cukup untuk bekerja. Sementara itu pemberontakan bersenjata dan tuntutan daerah terhadap Pemerintah Pusat makin meluas, seperti pemberontakan DI-TII di Jawa barat, Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan serta pemberontakan PRRI/PERMESTA di Sumatera dan Sulawesi.

Ketidakstabilan politik dan keamanan dan tidak terjaminnya keselamatan rakyat mendorong TNI mengambil tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu seperti pemberlakuan undang-undang keadaan bahaya pada tahun 1957.

Dalam usaha pemulihan keamanan, TNI menyadari sepenuhnya, bahwa keamanan tidak dapat dipulihkan dengan kekuatan senjata saja, karena gangguan keamanan itu berlatar belakang sosial politik. Salah satu langkah yang diambil oleh TNI adalah penggalangan golongan-golongan fungsional dengan maksud agar golongan tersebut dapat diajak turut dalam pemulihan keamanan. Sebagai wadah kerja sama dibentuklah berbagai badan kerjasama sipil-militer, seperti Badan Kerjasama Buruh Militer, Badan Kerjasama Tani Militer, Badan

Kerjasama Pemuda Militer, Badan Kerjasama wanita Militer, dan Badan Kerjasama Ulama Militer.

Ajakan TNI kepada golongan-golongan fungsional untuk bekerja sama mendapat sambutan positif dari golongan-golongan fungsional yang tidak berafiliasi kepada suatu Partai Politik. Mereka merasa bahwa badan kerja sama yang dibentuk TNI itu adalah wadah perjuangan yang tepat untuk menjalankan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.

Puncak pertentangan Partai-Partai Politik dalam masa demokrasi parlementer adalah Konstituante dalam menetapkan Dasar Negara pada tahun 1959. Pertentangan tersebut berpusat pada adanya Partai-Partai Politik yang dengan gigih pula menghendaki dan memperjuangkan syariat Islam sebagai Dasar Negara. Karena tidak adanya kesepakatan, maka diadakanlah pemungutan suara sampai tiga kali, tetapi masing-masing kelompok Partai Politik yang berbeda pendapat itu tidak mampu mengumpulkan 2/3 suara yang diperlukan. Walaupun pendukung Pancasila lebih besar dibandingkan dengan pendukung syariat Islam, tetapi pendukung ideologi Pancasila tidak berhasil mengumpulkan 2/3 suara yang diperlukan.

Untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari kekacauan dan kehancuran, maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit President 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945, yang dalam Pembukaannya memuat Pancasila yang resmi dan asli sebagai dasar negara kita.

Dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka mulailah dirintis penyerdehanaan Partai Politik. Pada permulaan tahun 1961 Partai hanya diakui 10

Partai Politik. Tetapi walaupun jumlah partai-partai politik telah berkurang, ternyata tidak mengurangi pertentangan ideologi didalam masyarakat malahan pertentangan itu makin meruncing. Hal ini disebabkan adanya format Politik Nasakom (nasionalis, agama, komunis) yang digagas oleh Soekarno. PKI yang menjadi tulang punggung utama politik Nasakom itu menuntut agar semua lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan, termasuk golongan fungsional "dinasakomkan". PKI sebagai tulang punggung utama politik nasakom menjadi semakin dominan dalam percaturan politik nasional. Untuk menghadapi ancaman PKI, maka didirikanlah Soksi, Kosgoro, dan MKGR.

Sebagai perlawanan terhadap tekanan-tekanan PKI dan dalam rangka pelaksanaan UUD 1945, maka golongan-golongan fungsional yang tidak berafiliasi pada Partai Politik dan dengan dukungan TNI berjuang keras untuk memformalkan kehadirannya didalam masyarakat. Melalui perjuangan yang ulet dan terus menerus dari golongan fungsional, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1959, diangkatlah 200 (dua ratus) orang wakil-wakil golongan karya di MPRS. Kemudian dengan keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1964 diakui lah wakil-wakil golongan karya di Front Nasional.

Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional, maka atas dorongan TNI dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya, disingkat Sekber Golkar, pada tanggal 20 Oktober 1964. Tanggal inilah yang merupakan lahirnya Golkar yang kita peringati

Setelah meletus peristiwa G.30.S/PKI, maka TNI, SEKBER GOLKAR, pemuda, mahasiswa, dan rakyat yang Pancasilais bangkit dengan serentak menumpas gerakan pengkhianatan G.30.S/PKI itu. Dalam waktu yang singkat gerakan pengkhianatan G.30.S/PKI itu dapat ditumpas habis.

Pada masa awal pertumbuhannya, SEKBER GOLKAR beranggotakan 61 organisasi fungsional, kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional karena golongan-golongan fungsional lainnya sudah menyadari bahwa 1945 serta tujuan dan haluannya adalah Demokrasi Pancasila untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Sementara itu proses kristalisasi dalam sebuah SEKBER GOLKAR berjalan terus. Dengan didirikannya PARMUSI pada tahun 1968, maka sejumlah organisasi melepaskan diri dari SEKBER GOLKAR. Sementara itu dibentuklah KINO-KINO (kelompok Induk Organisasi) sebagai pengelompokan dari organisasi-organisasi yang tergabung dalam SEKBER GOLKAR. Proses kristalisasi ini berlanjut lagi dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1969 yang pada waktu itu terkenal dengan sebutan PERMEN 12.

Dalam keadaan yang telah terkristalisasi demikian, SEKBER GOLKAR memasuki Pemilu 1971. Ternyata rakyat memberikan kepercayaan kepada SEKBER GOLKAR, dimana SEKBER GOLKAR meraih 62,79 % suara pemilih.

Setelah GOLKAR meraih kemenangan dalam Pemilu 1971, maka sesuai dengan Ketentuan dalam Ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber Golkar mengubah

dirinya menjadi GOLKAR. Demikianlah secara ringkas latar belakang perkembangan GOLKAR.

Dari uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa lahirnya GOLKAR adalah merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi suasana kehidupan politik yang penuh dengan pertentangan politik diantara partai-partai politik karena adanya pengkotak-kotakkan dan fanatisme golongan yang sempit yang sangat sudut proses konsolidasinya, maka GOLKAR adalah wadah bagi setiap warga negara Indonesia yang mempunyai persamaan kehendak dan cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkesinambungan antara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar inilah, makasa Anggaran Dasar Golkar menegaskan, bahwa Golkar berorientasi pada program penmabgunan tanpa membedakan latar belakang ras, suku, asal usul, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

## 2. Posisi dan Peran Golkar Di Masa Orde Baru

Dalam memasuki Orde Baru, maka untuk memantapkan dirinya diadakanlah Musyawarah Kerja Nasional I (MUSKERNAS I) SEKBER GOLKAR dari tanggal 9 sampai dengan 11 Desember 1965, dengan tema "Konsolidasi Orde Baru". MUSKERNAS berhasil menyusun program konsolidasi organisasi dan program perjuangan disegala bidang dalam rangka usaha mengakkan Orde Baru.

Dalam masa awal Orde Baru, Sekber Golkar tumbuh dan berkembang bersama sama dengan eksponen-eksponen Orde Baru lainnya, mempolonori

pembaruan kehidupan politik berdasarkan konsepsi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen serta melaksanakan Pembangunan Nasional di segala bidang sebagai upaya pengisian cita-cita Proklamasi.

Selama perjalanannya GOLKAR telah memposisikan diri sebagai kekuatan sosial politik pendukung Orde Baru. Hal ini tercermin dari seriap pelaksanaan Munas GOLKAR senantiasa menghasilkan keputusan yang memberikan dukungan terhadap program-program pemerintah. Dengan kata lain, program organisasi selalu disinkronisasi dengan program pemerintah dan mendapat dukungan serta legitimasi dari lembaga legislatif yang dikuasai oleh GOLKAR.

Kedudukan Ketua Dewan Pembina yang juga adalah Presiden (Mandataris MPR) sangat dominan mewarnai keputusan-keputusan GOLKAR, bahkan dapat membatalkan keputusan-keputusan yang telah dihasilkan oleh musyawarah organisasi dan membekukan dewan pengurus. Hal ini telah menyebabkan berkurangnya kemandirian Golkar. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh GOLKAR apabila merupakan kebijakan penting dan esensial harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Dewan Pembina sehingga kepengurusan terkesan telah kehilangan, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan demokrasi.

Ada empat hal utama yang menjadi ciri GOLKAR di masa Orde Baru. Pertama, dikenalkannya istilah "Sistem Tiga Jalur" ("A" ABRI, "B" Birokrasi, "G" GOLKAR). Kedua, dominannya peranan lembaga Dewan Pembina. Ketiga,

pengambilan keputusan selalu dari atas (top down). Dan keempat,...

menghindari pemungutan suara (voting) untuk menentukan pimpinan organisasi disemua tingkat kepengurusan terbawah.

Fenomena umum yang tergambar dari kehidupan kekuatan sosial politik (Orde Baru, parpol dan GOLKAR) terkesan terlalu kaku, struktural, institusional dan formalistik. Seluruh kekuatan sosial politik, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, diarahkan untuk memberikan dukungan berupa legitimasi yang kuat kepada pemerintahan Orde Baru.

Kondisi tersebut tercipta akibat berkembangnya sistem politik yang menempatkan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama yang dikenal dengan nama pembangunanisme (*developmentalisme*). Hal ini diterima luas oleh sebagian besar elit dan massa. Salah satu syarat pembangunan ekonomi itu ialah adanya stabilitas politik, dengan jalan mengurangi partisipasi politik dan membatasi kebebasan politik.

Pembangunanisme kemudian melahirkan budaya politik teknokratik (mengutamakan kemampuan teknis/keahlian) dan birokratik (pengaturan dari atas sentralistik). Hal ini menjadi apopulis dan apolitik. Dalam bingkai itulah Golongan fungsional, memastikan persemin yang subur untuk tumbuh, dan dalam masa awal Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi selama 30 tahun.

### 3. Perkembangan Partai GOLKAR era Reformasi

Sejak pelaksanaan Munaslub GOLKAR pada bulan Juli 1998 GOLKAR semakin menegaskan untuk memperbarui dirinya sesuai dengan semangat dan tuntutan reformasi. Visi dan Misi Partai GOLKAR Baru adalah memajukan dan melindungi



dengan GOLKAR lama. Ada beberapa ciri yang tidak lagi melekat sebagai masa lampau, sekalipun Partai GOLKAR juga tetap mempertahankan citra sejarahnya sebagai kekuatan politik nasional yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara.

Beberapa hal yang dapat dilihat sebagai perbedaan yang signifikan dengan GOLKAR masa lampau GOLKAR, adalah pembaruan Partai GOLKAR. Struktur Kepemimpinan Partai GOLKAR era reformasi tidak lagi mempunyai institusi Dewan Pembina. Dahulu Dewan Pembina GOLKAR dipimpin oleh Presiden, sekarang ini dihapus. Partai GOLKAR menghapus institusi Dewan Pertimbangan di propinsi, Ketua Dewan Pertimbangan itu adalah Gubernur. Partai GOLKAR tidak punya lagi ketua Dewan Penasehat di kabupaten/kota, yang semula dijabat oleh Bupati.

Secara struktural dan dalam konteks kader, Partai GOLKAR tidak lagi mempunyai hubungan politik internal dengan pemerintah. Dengan melakukan reformasi pada struktur kepemimpinan berarti proses pengambilan keputusan internal Partai GOLKAR dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat sendiri.

Di era reformasi, Partai GOLKAR mempunyai institusi Penasehat. Namun, posisi Penasehat tidak secara struktural membawahi kepengurusan Partai GOLKAR ditingkat masing-masing (pusat dan daerah). Para Penasehat diangkat berdasarkan pertimbangan senioritas dalam kekaderan GOLKAR, dan nasehat itu tidak mengikat Partai GOLKAR. Selama lebih 30 tahun pengambilan keputusan didalam Partai GOLKAR selalu berdasarkan keputusan politik yang sangat

sehingga Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah GOLKAR hanya menjadi pelaksana saja. Setelah deklarasi GOLKAR Baru tidak adalagi campur struktur lain diatas Dewan Pimpinan. Partai GOLKAR benar-benar berada ditangan Dewan Pimpinan dari Partai GOLKAR sendiri yang secara mandiri menetapkan keputusan bagi kepentingan organisasi partai. Demikian pula dalam kaitan dengan pola rekrutmen, kaderisasi, dan sistem musyawarah yang diberlakukan mengalami perubahan.

Sebagai akibat perampingan struktur kepemimpinan dalam tubuh Partai GOLKAR, maka pemilihan Pimpinan GOLKAR yang selama ini selalu berdasarkan "tuntutan", "arahan", dan "keputusan" dari atas, maka pemilihan Pimpinan Partai GOLKAR justru bersumber dari hasil pelaksanaan pemilihan langsung. Arus aspirasi politik dalam pemilihan sangat terbalik, apabila dulu diturunkan dari atas (*top down*) maka sekarang dipilih dari bawah (*bottom up*). Ketua Umum DPP Partai GOLKAR di era reformasi terpilih berdasarkan aspirasi dari bawah. Demikian pula pemilihan pimpinan Partai GOLKAR di daerah-daerah. Hal ini juga terjadi pada pemilihan Ketua Umum partai lain yang berjalan secara demokratis. Tampaknya di era reformasi bangsa Indonesia telah sepakat untuk meninggalkan gaya *top down* dan mengambil gaya *bottom up*, yakni berdsarkan aspirasi dari bawah keatas.

Dengan prinsip ini GOLKAR mengubah posisinya, apabila dulu GOLKAR sulit dipisahkan dari pemerintah, dengan adanya jalur ABRI, Biorkrasi, dan GOLKAR sehingga sering diidentikan politik yang mengalami reformasi internal dan struktur melalui penyesuaian diri terhadap tuntutan reformasi. Dalam

tidak ada dua faktor penting yang amat mempengaruhi pembaruan dalam tubuh GOLKAR. Pertama, keinginan Internal GOLKAR, dan kedua adanya desakan eksternal. Karena GOLKAR berada pada lingkungan dimana perubahan-perubahan terjadi sejalan dengan tuntutan reformasi, maka desakan eksternal untuk reformasi tidak dapat dihindarkan.

## **B. Doktrin Perjuangan Partai Golongan Karya**

Dengan paradigma baru ini, doktrin Partai GOLKAR tetap sebagai kelanjutan dari sekretariat Bersama (SEKBER) GOLONGAN KARYA yang lahir pada tanggal 20 Oktober 1964. Partai GOLKAR tetap berpegang pada doktrin karya kekaryaan, yaitu Karya Siaga Gatra Praja, tetapi dipahami secara kreatif dan dinamis sesuai dengan dinamika perkembangan jaman.

Dengan doktrin karya kekaryaan maka Partai GOLKAR selalu melihat masyarakat dalam perspektif fungsi, bukan dalam perspektif ideologi, apalagi aliran. Pengelompokan masyarakat yang terbaik dalam perspektif Partai GOLKAR adalah pengelompokan berdasarkan peran dan fungsinya. Dengan doktrin karya kekaryaan Partai GOLKAR berorientasi pada program (program oriented) dan atau pemecahan masalah (problem solving), bukan berorientasi pada aliran atau ideologi (*ideology oriented*).

Dengan perspektif ini ingin ditegaskan bahwa GOLKAR tidak sependapat dilakukannya pengelompokan politik berdasarkan primordialisme dan sektarianisme. Pembelahan masyarakat berdasarkan ideologi atau aliran-aliran

dikhawatirkan akan melahirkan konflik-konflik ideologi yang bermuara pada pertentangan, perpecahan, dan masalah disintegrasi bangsa.

Dengan orientasi ini maka masyarakat tidak akan terjebak dalam pertentangan atau konflik ideologi yang tidak perlu, melainkan berorientasi pada karya untuk membangun bangsa. Bagi Partai GOLKAR karya yang baik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat adalah lebih penting daripada ide atau gagasan semata. Karya kekeayaan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara sadar, terencana, sistematis, dan menyeluruh, untuk mendatangkan manfaat bagi rakyat. Karya kekeayaan adalah juga amal shalih dalam pengertian yang luas sebagaimana yang diajarkan agama-agama.

Oleh karena doktrin inilah Partai GOLKAR senantiasa prihatin menyaksikan kehidupan politik yang ditandai oleh maraknya persaingan tidak sehat diantara berbagai Partai politik yang membawa terjadinya konflik dan pertentangan politik yang tajam. Masing-masing Partai politik berusaha memobilisasi dukungan massa bagi kepentingan sempit, sehingga kepentingan bangsa yang lebih luas terabaikan. Sebagai akibat dari kecendrungan tersebut, Bangsa Indonesia kehilangan momentum untuk membangun diri guna mewujudkan cita-cita proklamasi.

Kegandrungan (*euphoria*) untuk menjadikan politik sebagai panglima kehidupan dan menekankan ideologi politik sektarianistik, seperti pada pengalaman lama, telah menghambat proses mensejahterakan rakyat. Sebagai akibatnya rakyat terjerebab ke dalam kemiskinan dan keterbelakangan dalam suasana ketidakpastian politik. Dalam suasana seperti itulah Partai GOLKAR

tampil dengan doktrin karya kekaryaan karena tidak ingin bangsa ini terpecah ke dalam kotak-kotak sempit yang hanya akan mengancam keutuhan bangsa.

### **C. Visi dan Misi Perjuangan Partai Golongan Karya**

#### **1. Visi Perjuangan**

Sejalan dengan cita-cita para bapak pendiri negara (*the founding fathers*) kita bahwa tujuan bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ikut menciptakan perdamaian dunia, maka Partai GOLKAR sebagai pengemban cita-cita Proklamasi mengaskan visi perjuangannya untuk menyertai perjalanan bangsa mencapai cita-citanya.

Partai GOLKAR berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berakhlak baik menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan serta disiplin yang tinggi.

Dengan visi ini maka Partai GOLkar hendak mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan. Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali sistim kenegaraan kita semua

bidang agar kita dapat berakit kembali dalam suasana yang lebih terbuka dan

demokratis. Bagi Partai GOLKAR upaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu pada kedaulatan rakyat adalah cita-cita sejak kelahirannya.

Keterbukaan adalah nilai kemanusiaan hakiki yang merupakan napas dari gerakana reformasi. Atas dasar pandangan keterbukaan tersebut, kita harus menciptakan sistim sosial politik yang terbuka atau transparan dengan struktur dan proses politik yang dapat secara efektif benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat. Untuk itu maka peluang bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses-proses politik mutlak dibuka seluas-luasnya. Kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat semakin terjamin dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Sendi utama masyarakat madani adalah supremasi hukum. Oleh karena negara kita adalah negara hukum maka supremasi hukum harus ditempatkan sebagai pilar utama dalam rangka mewujudkan sistim politik yang demokratis dan berdasarkan hukum. Partai GOLKAR memandang bahwa reformasi hukum tidak terbatas hanya pada penyempurnaan sanaran dan prasarana, materi dan aparatur hukum, tetapi juga budaya hukum.

Di bidang ekonomi visi Partai GOLKAR adalah ekonomi rakyat atau kerakyatan atas dasar keyakinan bahwa hanya sistim perekonomian inilah yang menjamin rakyat makin sejahtera. Pembangunan ekonomi dalam paradigma lama yang terlampau menekankan pertumbuhan dengan tulang punggung konglomerasi ternyata justru membawa Negara dan Bangsa Indonesia terjerebab kedalam krisis ekonomi yang sangat parah. Konglomerasi ternyata semu dan sangat rapuh

terhadap goncangan ekonomi global. Dalam konteks ini, maka paradigma ekonomi kerakyatan justru memiliki potensi yang sangat kuat bagi penguatan fundamental ekonomi kita.

Dengan visi ekonomi kerakyatan ini, maka usaha kecil, menengah, dan koperasi akan dikembangkan dan diperkuat sebagai pilar utama perekonomian nasional. Partai GOLKAR menginginkan dimasa depan usaha menengah, kecil dan koperasi menjadi ujung tombak pemberdayaan masyarakat dalam bidanpengertian yang sebenarnya. Tanpa upaaya-upaya pemberdayaan rakyatnya, maka tujuan menciptakan masyarakat madani akan semakin jauh dari gapaian kita. Untuk itu sejalan dan searah dengan visi menciptakan kesejahteraan rakyat, prihatin terhadap upaya penguatan usaha menengah, kecil dan koperasi menjadi prioritas yang paling diutamakan.

Dibidang sosial budaya, Partai GOLKAR mencita-citakan pengetahuan budaya bangsa yang mampu melahirkan bangsa yang kuat, yakni bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau ketrampilan, memiliki etos kerja yang tinggi, memilik disiplin sosial yang tangguh dan memiliki etika yang kuat. Untuk menuju terciptanya bangsa yang kuat semacam itu, maka perlu dikembangkan suasana dan iklim yang mendukung bagi berkembangnya budaya ilmu (etos intelektualisme), budaya kerja (etos kerja), budaya disiplin, dan budaya hidup etis dan relegius dikalangan masyarakat. Partai GOLKAR memandang kerukunan sebagai basis bagi integrasi bangsa. Untuk itu, maka kehidupan sosial budaya yang berkeadilan dan terjembatannya kesenjangan sosial ekonomi antar individu,

antar kelompok, antar kota-desa, antara jawa-luar jawa, dan antar pusat-daerah, menjadi agenda penting yang harus dipentingkan. Demikian juga halnya pengembangan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama menjadi kepedulian Partai GOLKAR.

Dengan visi ini pula Partai GOLKAR hendak mengembangkan pola hubungan sosial yang lebih harmonis dan dilandasi oleh semangat persamaan manusia. Pandangan yang diskriminatif dan tidak adil terhadap suatu kelompok tertentu harus dihapuskan dari segenap masyarakat kita, dan diganti dengan pandangan yang diliputi oleh semangat kekeluargaan, kebersamaan dan persaudaraan sejati antar warga Negara.

## 2. Misi Perjuangan

Dalam rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut Partai GOLKAR dengan ini menegaskan misi perjuangannya, yakni: menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan idiologi bangsa demi untuk memperkokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia.

Dalam rangka membawa misi mulia tersebut Partai GOLKAR melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah partai politik modern, yaitu:

**Pertama**, mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik.

**Kedua**, melakukan rekrutmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (*merit system*) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-



posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

*Ketiga*, meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi dan kritik dari masyarakat.

#### **D. Sejarah Perkembangan Partai Golkar di Kota Yogyakarta**

Pada awal pembentukan Partai Golongan Karya di Kota Yogyakarta berawal dari pembentukan Sekretariat Bersama Golongan Karya Tahun 1964 yang dipelopori oleh tiga organisasi masa diantaranya Kino MKGR, Kino SOKSI, KOSGORO orang-orang yang ada didalam Organisasi masa itu adalah orang-orang pensiunan Tentara Pelajar yang memiliki cita-cita kekaryaan yang didasari oleh Proklamasi.

Dengan Prakasra yang telah dibentuk itu yang disebut Sekber GOLKAR yang didasari oleh kesamaan Visi dan Misi yang mana akan meneruskan langkah Revolusi untuk Pembangunan Indonesia Kedepannya baik ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam hal ini apa yang menjadi cita-cita Sekber GOLKAR yang ada di pusat dapat diaspirasikan oleh Sekber GOLKAR yang ada di daerah-daerah di Indonesia.

Setelah itu Pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber GOLKAR mengubah namanya menjadi GOLKAR dan keahungan Sekber GOLKAR

didaerah-daerah yang ada di Indonesia mengubah namanya menjadi GOLKAR. Seiring berjalannya waktu GOLKAR menjadi sosok yang memimpin Negara ini dengan baik, kemudian GOLKAR menjadi besar sampai sekarang dengan diadakan musda-musda yang telah dilaksanakan yang membentuk program-program kerja yang mengenai aspirasi rakyat.

Hasil musda secara Umum Pengurus DPD Partai GOLKAR Kota Yogyakarta pada tahun 2009 adalah sebagai berikut ;

1. Sukses Konsolidasi dan Pengembangan Partai GOLKAR
2. Sukses Kaderisasi dan Regenerasi
3. Sukses Kemandirian, Demokrasi dan Pembangunan yang berkesejahteraan
4. Sukses Pemilu 2009-2014

Hasil musda secara Umum Pengurus DPD Partai GOLKAR Kota Yogyakarta pada tahun 2009 adalah sebagai berikut ;

1. Bidang Kelembagaan

Usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan dibidang kenaggotaan adalah :

- a. Meningkatkan pendayagunaan kepengurusan Partai GOLKAR ditingkat Pusat, Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan dan Pimpinan Desa/Kelurahan.
- b. Memantapkan peran dan fungsi kelembagaan organisasi yang bersifat vertikal dan horizontal.
- c. Menyelenggarakan mekanisme kerja kepengurusan secara musyawarah/mufakat sesuai dengan prinsip kepemimpinan

kolektif, kekeluargaan dan penuh keterbukaan dalam suasana demokratis.

- d. Meningkatkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kader Partai GOLKAR secara tetap, dengan mendayagunakan lembaga/ badan dan kelompok kerja yang dianggap perlu.
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana organisasi pada semua tingkatan organisasi.
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana organisasi pada semua tingkatan organisasi.
- g. Mengembangkan dan mendayagunakan forum diskusi kader sesuai dengan kondisi dan situasi daerah.
- h. Mengembangkan basis Partai GOLKAR melalui pembentukan organ organisasi sayap, antara lain; basis buruh, tani dan nelayan.
- i. Mengembangkan kelembagaan dalam prespektif peranan baru Partai GOLKAR sebagai kekuatan *checks and balances* dalam kehidupan politik dan pemerintahan, yang diwujudkan dalam pembedaan tugas/kompartementasi.

## 2. Bidang penggalan dan pendayagunaan dana

Usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan di bidang penggalan dan pendayagunaan dana adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran anggota untuk memenuhi kewajibannya

memberikan iuran anggota secara lebih intensif dan tertib

- b. Mengidentifikasi dan mengupayakan seluas-luasnya sumber pembiayaan partai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana Partai.
3. Bidang hubungan dengan organisasi sosial / kemasyarakatan dan profesi / fungsional

Usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan di Bidang hubungan dengan organisasi sosial / kemasyarakatan dan profesi / fungsional adalah :

- a. Menjalin dan menyusun berbagai pola kerjasama guna memperluas basis dukungan partai .
- b. Meningkatkan kerjasama sinergi dengan organisasi pendiri dan organisasi yang didirikan oleh Partai GOLKAR.
- c. Menjalin kerjasama sinergi untuk memperkuat sumber daya Partai GOLKAR dalam berbagai bidang.

4. Bidang hubungan kerjasama sinergi dengan Partai politik lain

Usaha-usaha, dan kegiatan-kegiatan di Bidang hubungan kerjasama sinergi dengan partai politik lain adalah :

Melakukan berbagai kerjasama baik berupa koalisi dan atau aliansi dengan partai politik di berbagai tingkatan guna mencapai tujuan bersama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

5. Bidang penerangan dan media massa, penelitian dan pengembangan

Usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan di Bidang penerangan dan media massa, penelitian dan pengembangan serta pembinaan hukum dan HAM adalah :

- a. Melakukan kerjasama proaktif dan komunikasi terbuka dan efektif dengan pihak media massa guna membangun opini publik dan citra partai GOLKAR.
- b. Menyusun kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap seluruh aspek di semua tingkat organisasi Partai GOLKAR guna memperoleh berbagai masukan dalam mendukung proses pengambilan keputusan.
- c. Melakukan kegiatan advokasi hukum dan HAM bagi kepentingan organisasi anggota dan masyarakat

## E. Susunan Pengurus DPD Partai Golongan Karya Kota Yogyakarta

### Komposisi dan Personalia

#### Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Yogyakarta

Masa Bakti 2009-2015

No	Nama	Jabatan
1	AUGUSNUS, SH, SIP	Ketua
2	R.H. SANTOSO BUDI RAHARJO, SH	Wakil Ketua Bagian Organisasi dan Kelembagaan
3	Ir. SYAHRIL MACHMUD, MMT	Wakil Ketua Bagian Kaderisasi, Keanggotaan dan Diklat
4	SUGIYANTO SAPUTRO,BA	Wakil Ketua Pemenangan Pemilu
5	BAMBANG SENO BASKORO, ST	Wakil Ketua Bagian Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya
NO	NAMA	JABATAN
6	TRI KIRANA MUSDILATUN,S.Psi	Wakil Ketua Bagian Pemberdayaan Perempuan, Pengabdian Masyarakat, Hukum dan Ham
7	H.SUMARDI EP, BA	Wakil Ketua Bagian Tenaga Kerja, Koperasi, UKM dan Informasi Komunikasi
8	R.BAGUS SUMBARJA	Wakil Ketua Bagian Penanggulangan Bencana Alam, Lingkungan Hidup dan Keagamaan
9	R. ARTIYADI	Sekretaris
10	SAYOK	Wakil Sekretaris Bagian Organisasi dan Kelembagaan
11	MUJIBBURAHMAN, SE	Wakil Sekretaris Bagian Kaderisasi, Keanggotaan dan Diklat
12	WAHYU JATMIKO	Wakil Sekretaris Bagian Pemenangan

		Pemilu
13	Y. HERU WINTOKO	Wakil Sekeretaris Bagian Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya
14	FATCHIYATUL FITRI, SH	Wakil Sekeretaris Bagian Pemberdayaan Perempuan, Pengabdian Masyarakat, Hukum dan HAM
15	H.M SAID ISMAIL	Wakil Sekeretaris Bagian Tenaga Kerja, Koperasi, UKM dan Informasi Komunikasi
16	SUTIRMAN EKA ARDHANA	Wakil Sekeretaris Bagian Penanggulangan Bencana Alam, Lingkungan Hidup dan Keagamaan
17	<b>FRANSISKA ROMANA SIRWATINI</b>	<b>Bendahara</b>
18	NURJANAH	Wakil Bendahara
19	DWI ASTUTI	Wakil Bendahara
20	H.HARIAWAN EMIR N, S.Sos	Bagian Organisasi dan Kelembagaan
21	SRI ADI ENDARYANA, ST	Bagian Organisasi dan Kelembagaan
22	NANIK WIJAYANTI	Bagian Organisasi dan Kelembagaan
23	ARIAMAN LESTARI	Bagian Kaderisasi, Keanggotaan
24	KUSJAYANTI	Bagian Kaderisasi, Keanggotaan
25	Drs. AKHMAD LUTHFIE BHISYA	Bagian Kaderisasi, Keanggotaan
26	Drs. BAMBANG YUWONO	Bagian Pendidikan dan Latihan
27	Dra. EMMY RINA MUSTIKANINGRUM	Bagian Pendidikan dan Latihan
28	TATIT ARIFIN PUTRA	Bagian Pendidikan dan Latihan
29	SETYO MURTIKUSUMO	Bagian Pemenangan Pemilu
30	SUBARDI	Bagian Pemenangan Pemilu
31	JEFTA SINANU, SE	Bagian Pemenangan Pemilu
32	ISTIYARTI DJONO	Bagian Pemberdayaan Perempuan
33	Hj.MAHYARDIANA	Bagian Pemenangan Pemilu

	COKRORAHADIWINOTO	
34	SULASMI	Bagian Pemenangan Pemilu
35	M.RIFAI, SH	Bagian Hukum dan HAM
36	INDRA NEVO	Bagian Hukum dan HAM
37	IRMA SUWARNING DYASTUTI, S.Psi	Bagian Hukum dan HAM
38	Drs. AGUS TRI WIDODO, ST	Bagian Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM
39	RITA YUNINGSIH	Bagian Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM
40	HASRI SURASMI	Bagian Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM
41	H.PANUT WIDIATMOKO	Bagian Penanggulangan Bencana Alam, Lingkungan Hidup
42	SWARDJONO	Bagian Penanggulangan Bencana Alam, Lingkungan Hidup
43	SARJONO	Bagian Penanggulangan Bencana Alam, Lingkungan Hidup
44	Drs. SUHARMADI	Bagian Keagamaan
45	H.ABDUL HARRITS HS	Bagian Keagamaan
46	SARDJONO S.Z	Bagian Keagamaan
47	HERMAN	Bagian Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya
48	WAHYU BINTORO	Bagian Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya
49	DWI KOS HANDOKO	Bagian Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya
50	H.SUDARSONO, SKM, MA	Bagian Informasi dan Komunikasi
51	A.RAHMAN NURVIDANA	Bagian Informasi dan Komunikasi
52	ERNA REDYAWATI	Bagian Informasi dan Komunikasi



53	MARIA C SRI WARYATI SUDJADI	Pengabdian Masyarakat
54	ERNIA DEWI	Pengabdian Masyarakat
55	HERI BUDI ATANA, ST	Pengabdian Masyarakat

## **F. Kepengurusan Angkatan Muda Partai GOLKAR Kota Yogyakarta**

### **Komposisi dan personalia Kepengurusan Angkatan**

#### **Muda Partai GOLKAR Kota Yogyakarta**

#### **Masa Bakti Tahun 2009-2015**

Ketua : Bambang Seno Baskoro, S.T

Wakil Ketua : Guntur Setyawan

Erna Redyawati

Suwarjono

R. Binurrahman Hidayat

Sekretaris : Y. Heru Wintoko

Wakil Sekretaris : Andhi Chandra Yudha

Kristian Nugroho Nufrianto

Agus Wicaksono

Sunarjino

Bendahara : Hasri Surasmi

Wakil Bendahara : Wahyu Bintoro

Bagian-Bagian

Organisasi dan Keanggotaan : Bangun Abadi

Kaderisasi

Ari Purwoko

Suryani Erna Fitriyanti

Kristina Mega Ayu Pradipta

Lussy Eveline Rawar

Giarto

Delina

: Heri Sutanto Bowo S

Linda Fanitasari

Angga Avianto

Ibnu Sutapa

Ekoa

Dina

Anton

Ganis Rahardjo

: Sarjono

Nugroho Hadi Ismanto

Bambang Sugiarto

Arifin Rosyadi

Kupras Ramadhani

Umang Aroni

Robertus Trsina Wijaya

Joko Tri S

Suyodhono

Aksi Sosial dan Penanggulangan

Bencana Alam

Hukum, Advokasi dan HAM

: R. Bambang Kusmianto, Amd

Iwan SP

Rahadyaantomo

Istriani Widiastuti

Beti

Pengawas dan Pengendalian Massa

: B.V Dwi Kushandoko

Iwan Febrianti

Pandu Harimurti

Joko Sulistyو

Andi Padmono

Arah Untoro

Budiantoro

Teguh

Bambang Susilo

Supriyanto

Wahyudi

Hubungan Organisasi, LSM

: Primananda Mustika Putra

Dan Kemahasiswaan

Sugeng Hartono

Litbang Dara dan Informasi

: Andre Librianto. Spik

Kristianto Eko Nurhayadi

Fajar Murwani

Indra

Sri Gustiningsih

Ayu Indah Lestari